

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Implementation of Village Government Policy in Promoting Micro,
Small, and Medium Enterprises in Laut Dendang Village,
Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency**

Ira Nirwana Nasution & Khairunnisah Lubis

Universitas Medan Area

iranirwana809@gmail.com; khairunnisah@staff.uma.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 15, 2025	May 12, 2025	May 24, 2025	May 28, 2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of village government policies in supporting the development and empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) through the Village-Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) Bumi Pertiwi in Laut Dendang Village, Percut Sei Tuan Subdistrict, Deli Serdang Regency. The background of this study is the high number of UMKM actors in the village and the existence of village policies aimed at strengthening the local economic sector. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results indicate that the implementation of BUMDes programs in supporting UMKM has not been optimal due to several obstacles, including delays in loan repayments caused by low borrower discipline, weak recipient selection systems, limited program outreach,

and inadequate managerial and administrative capacity of BUMDes managers. These obstacles have affected the effectiveness of the program and led to declining community trust in BUMDes. Nevertheless, BUMDes still holds potential as an instrument for strengthening the village economy if accompanied by continuous capacity building, improved governance, strict selection systems, and enhanced human resource capacity. These findings contribute to the strengthening of community-based local economic institutions and support sustainable village development.

Keywords: Policy Implementation; Village Government; UMKM Empowerment; BUMDes; Local Economy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah pelaku UMKM di desa tersebut dan adanya kebijakan desa yang bertujuan memperkuat sektor ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BUMDes dalam mendukung UMKM belum berjalan optimal akibat sejumlah hambatan, antara lain keterlambatan pengembalian pinjaman karena rendahnya disiplin peminjam, lemahnya sistem seleksi penerima, minimnya sosialisasi program, serta keterbatasan kapasitas manajerial dan administratif pengelola BUMDes. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas program dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Meskipun demikian, BUMDes tetap memiliki potensi sebagai instrumen penguatan ekonomi desa apabila disertai pembinaan berkelanjutan, perbaikan tata kelola, sistem seleksi yang ketat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pemerintah Desa; Pemberdayaan UMKM; Bumdes; Ekonomi Lokal

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan arah terwujudnya tujuan kebijakan publik sebagai akibat dari tindakan pemerintahan. Kebijakan lebih mudah diimplementasikan ketika pemerintah dan masyarakat seimbang (Stefana & Lubis, 2025). Ini merupakan salah satu faktor yang mendukung berjalannya politik. Ada beberapa jenis kebijakan pemerintah di Indonesia salah satunya adalah bidang ekonomi. Tujuan dari kebijakan ekonomi tersebut adalah untuk mengatur sistem perekonomian suatu negara sehingga mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Situasi

ekonomi Indonesia saat ini telah membaik sebesar 5,31% dibandingkan tahun lalu. Indonesia memiliki lima sektor utama yang dapat menopang perekonomian Indonesia: manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Selain itu, sektor pengangkutan dan pergudangan serta akomodasi, makanan dan minuman yang mengalami kontraksi pada Triwulan ketiga 2021 telah berhasil pulih kembali dengan pertumbuhan positif pada Triwulan keempat 2021 (Limanseto, 2022).

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang harus dijalankan secara baik, ditunjang dengan berbagai aspek pendukung yang mampu mensukseskan upaya perwujudan implementasi kebijakan tersebut. Pada artikel ini, peneliti akan membahas salah satu kebijakan yang ada di Indonesia khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan adanya kebijakan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (DPR RI, 2008). Undang-Undang ini dibuat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional di Indonesia yang memiliki cita-cita luhur seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dalam prosesnya dapat membentuk sumber manusia yang unggul dan secara otomatis tingkat pengangguran di Indonesia pun dapat di minimalisir sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka pemerintah pun membuat langkah-langkah kebijakan yang telah disepakati bersama untuk di implementasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, implementasi kebijakannya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah implementasi kebijakan itu telah berjalan dengan baik pula dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah yang selaku pelaksana dalam pembuatan kebijakan maupun antar organisasi ke pemerintahannya yang berada di pusat maupun di daerah serta masyarakat selaku pengawas dari berjalannya kinerja pemerintah tersebut (Iskandar et al., 2021).

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. BUMDes merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa, bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat (Ainiyah et al., 2020). Pembentukan BUMDes dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui musyawarah desa. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan badan usaha milik desa di Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan BUMDes di Laut Dendang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor

kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana di dalam implementasinya.

Fokus penelitian ini ada tiga, yang pertama siapa saja aktor yang menjadi penggerak program BUMDes. Kedua, bagaimana karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan BUMDes. Ketiga, bagaimana kepatuhan pelaksana BUMDes. Pada proses implementasi kebijakan BUMDes, banyak faktor yang memengaruhi. Adanya kepentingan faktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban untuk melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes.

Di sektor perdagangan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting bagi perekonomian global. Karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi global, menyumbang 90% aktivitas bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja global. Pada negara berkembang, UMKM informal menyumbang sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB). Kontribusi ini bahkan lebih besar ketika pemerintah mengikut sertakan UMKM informal, yang sebagian besar tidak tercakup (Indrawati, 2022). UMKM merupakan pondasi ekonomi yang bertahan hingga saat ini. Keberadaan UMKM menjadi salah satu kunci dari keberhasilan masyarakat Indonesia dalam melakukan wirausaha, serta menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada perekonomian Indonesia dalam pekerjaan yang relatif besar (Khamimah, 2021). Menurut (Limanseto, 2021) menyatakan bahwa ketika UMKM tidak dapat menghasilkan produk, maka UMKM tersebut dapat digantikan dengan produk lain. Dari situlah yang membuat perekonomian Indonesia bertahan hingga saat ini. Untuk memperkuat UMKM, ada tiga hal yang harus ditingkatkan dan diperhatikan, yaitu keuangan, peningkatan sumber daya manusia dan model pemasaran baru yang inovatif (Dohona et al., 2021).

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang

kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Fadhillah & Yuniarti, 2023). Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM dapat menjadi prioritas atau basis sistem ekonomi rakyat untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Amrullah & Utami, 2018).

Keberadaan UMKM sangat penting bagi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional. Namun, saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya (Najib et al., 2022). Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan, sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa (Pratiwi et al., 2021), sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralisasi pada masa lalu, mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai, tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes. BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes didirikan.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes di artikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (DPR RI, 2014). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Iskandar et al., 2021). Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola aset yang ada di dalam masyarakat, agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi (Rijal, 2023). Penelitian ini berfokus pada BUMDes Bumi Pertiwi yang berlokasi di Desa Laut Dendang. Salah satu program BUMDes Bumi Pertiwi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman kepada warga yang membutuhkan untuk dijadikan usaha ataupun menjadi tambahan modal untuk usaha yang dijalannya. Adanya bantuan dalam bentuk nyata dari BUMDes terbukti dapat memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa melalui BUMDes dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Laut Dendang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta persepsi para pelaku kebijakan dan masyarakat secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara rinci bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan, bagaimana aktor-aktor lokal berperan dalam proses tersebut, serta bagaimana kebijakan itu berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selama empat bulan yaitu 13 Februari hingga 15 Mei 2025. Sumber penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui beberapa teknik utama, yaitu

wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pengurus BUMDes Bumi Pertiwi, perangkat desa, pelaku UMKM, dan warga yang terlibat atau merasakan manfaat dari program BUMDes. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dinamika implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan dan kekurangan dari program yang dijalankan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas BUMDes dan lingkungan sosial-ekonomi desa untuk memahami konteks secara lebih menyeluruh. Dokumentasi terhadap peraturan, laporan pertanggungjawaban, dan data pendukung lainnya juga dikaji untuk memperkuat validitas temuan (Iba & Wardhana, 2023). Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi proses implementasi kebijakan secara utuh, termasuk faktor-faktor pendukung seperti karakteristik lembaga desa yang terbuka dan responsif, serta hambatan seperti kepentingan individu dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih partisipatif dan efektif, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat desa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga hal yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2019). Untuk validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga data penelitian dari hal yang telah didapatkan peneliti (Agustini et al., 2023). Sehingga dengan hal tersebut hasil yang didapatkan lebih optimal dan sesuai.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, serta pelaku UMKM, ditemukan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor UMKM, antara lain:

1. Pemberian Bantuan Modal dan Peralatan Usaha

Pemerintah desa melalui Dana Desa mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM.

“Kami telah mengalokasikan Dana Desa tahun 2023 dan juga 2024 ini secara maksimal untuk program UMKM, termasuk bantuan modal dan alat produksi bagi pengusaha kecil di desa kami.” Ungkap salah satu perangkat desa.

“Saya mendapatkan bantuan mesin pengiris pisang dan modal bahan baku. Alhamdulillah, produksi saya meningkat hampir dua kali lipat.” Ungkap Ibu Siti sebagai pelaku UMKM di desa.

2. Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha

Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

“Kami mengadakan pelatihan dasar tentang manajemen keuangan usaha, *packaging* produk, dan pemasaran digital. Pesertanya sekitar 30 lebih orang pelaku usaha kecil.” Ungkap Ketua BUMDes.

Beberapa pelaku usaha mengaku pelatihan ini sangat membantu dalam memahami pembukuan dan strategi promosi di media sosial.

“Bagi saya kegiatan pelatihan dari desa ini sangatlah membantu. Bukan hanya sekedar kita mengetahui tetapi juga beberapa hal praktek yang dilakukan agar UMKM yang kita punya itu semakin berjalan lebih baik dan berhasil”. Ungkap salah satu Ibu penjual UMKM yang mengikuti pelatihan dan kegiatan desa.

“Saya sebagai masyarakat secara umum yang tidak memiliki UMKM juga dapat merasakan hasilnya dengan adanya pemaksimalan UMKM di desa ini”. Ungkap Ibu Marni.

3. Pemasaran Produk melalui BUMDes dan Pameran Lokal

Produk-produk UMKM difasilitasi untuk dipasarkan melalui BUMDes dan dibawa ke event pameran tingkat kabupaten.

“Produk saya dipajang di etalase BUMDes dan pernah dibawa ke pameran di Lubuk Pakam. Itu sangat membantu menaikkan penjualan.” Ungkap Ibu Lestari sebagai usaha pengrajin.

Walaupun banyak inisiatif positif, **terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan**, masih ditemui beberapa hambatan seperti: keterbatasan sumber daya manusia, yaitu beberapa masyarakat desa yang belum memahami secara menyeluruh, dan juga adanya kurang seleksi terhadap bantuan modal yang dilakukan desa. Sedangkan secara kebijakan, maka implementasi kebijakan desa ini dilihat dari teori implementasi kebijakan Edward III, yang dapat disimpulkan menjadi beberapa hal berikut:

1. Komunikasi: Sudah berjalan baik melalui musyawarah desa dan sosialisasi langsung.
2. Sumber Daya: Masih terbatas, terutama dari segi pendampingan SDM dan anggaran yang belum bisa menjangkau seluruh pelaku usaha.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana: Perangkat desa menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung UMKM.
4. Struktur Birokrasi: Cukup efektif, namun masih perlu sistem distribusi dan verifikasi bantuan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan Pemerintah Desa Laut Dendang dalam meningkatkan UMKM telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam pemberian modal, pelatihan, dan pemasaran produk. Namun, masih perlu perbaikan dalam aspek pendampingan berkelanjutan dan pemerataan bantuan agar manfaat kebijakan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III sangat relevan, karena dalam teori Edward III, ada empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: (1) Komunikasi: yaitu sejauh mana informasi tentang kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan; (2) Sumber daya (*resources*): yaitu ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang memadai; (3) Disposisi/sikap pelaksana (*disposition*): yaitu tingkat komitmen, motivasi, dan persepsi para aktor terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan; (4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): yaitu prosedur, mekanisme koordinasi, dan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Tahir, 2015). Empat variabel implementasi kebijakan tersebut akan dirincikan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Dalam konteks kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes di Desa Laut Dendang, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai

proses penyampaian informasi semata, melainkan juga sebagai upaya membangun pemahaman bersama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, pelaku UMKM, dan masyarakat. Kebijakan akan sulit diimplementasikan secara efektif jika para pelaksana tidak memahami dengan jelas maksud dan arah kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, komunikasi harus bersifat dua arah, bukan hanya *top-down* dari pemerintah desa, tetapi juga *bottom-up* dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Penyampaian informasi harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan mudah dipahami, baik melalui forum musyawarah desa, pelatihan, maupun media informasi desa. Komunikasi yang terbuka juga akan memperkuat partisipasi masyarakat, karena mereka merasa dilibatkan dan memahami peran serta manfaat kebijakan bagi pengembangan ekonomi mereka. Sebaliknya, jika terjadi miskomunikasi atau informasi yang disampaikan tidak lengkap, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan resistensi dari masyarakat atau pelaksana BUMDes. Dengan demikian, kualitas komunikasi yang terbangun menjadi fondasi utama bagi terciptanya implementasi kebijakan yang berhasil dan berkelanjutan (Demarchi, 2020).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan sasaran kebijakan (Labib, 2024). Dalam konteks BUMDes di Desa Laut Dendang, komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes serta pelaku UMKM belum berjalan optimal. Informasi mengenai tujuan program, prosedur pelaksanaan, serta manfaat kegiatan pemberdayaan UMKM tidak sepenuhnya disampaikan secara terbuka dan berkesinambungan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang belum memahami peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.

Kurangnya media komunikasi yang memadai, seperti forum musyawarah, sosialisasi berkala, atau penyebaran informasi melalui media digital, memperparah kondisi ini. Komunikasi satu arah dari pihak pemerintah tanpa melibatkan pelaku UMKM dalam proses perencanaan juga menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap program. Untuk itu untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan, komunikasi harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan dua arah, di mana pemerintah desa mendengarkan aspirasi masyarakat serta memberikan ruang partisipasi aktif (Fadhillah & Yuniarti, 2023). Komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan antara pelaksana dan penerima kebijakan, serta menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui BUMDes.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu indikator penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta alokasi waktu yang tepat dan memadai (Justine, 2016). Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes di Desa Laut Dendang, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi penentu utama sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara optimal.

Ketersediaan dana operasional, misalnya, sangat penting untuk menjalankan berbagai program BUMDes, seperti pemberian pinjaman modal, pelatihan usaha, atau pengembangan produk lokal. Tanpa dana yang cukup, kegiatan ekonomi desa akan terhambat. Selain itu, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, terutama pengurus BUMDes, sangat memengaruhi kualitas manajemen dan pelayanan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Kurangnya pelatihan, minimnya pengalaman manajerial, dan lemahnya penguasaan teknologi dapat menjadi kendala serius dalam mengelola unit usaha desa secara profesional.

Sarana-prasarana seperti kantor operasional, alat produksi, dan akses digital juga sangat menentukan efektivitas program (Abrori, 2018). Jika fasilitas yang tersedia tidak memadai, maka produktivitas dan kualitas pelayanan BUMDes akan menurun. Begitu pula dengan alokasi waktu yang tepat dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tanpa perencanaan waktu yang matang, pelaksanaan bisa terburu-buru dan tidak efektif. Dengan demikian, terpenuhinya berbagai unsur sumber daya secara seimbang dan berkesinambungan merupakan syarat mutlak dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes di tingkat desa.

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan (Putri et al., 2023). Dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh BUMDes di Desa Laut Dendang, ditemukan sejumlah kendala pada aspek sumber daya. Pertama, keterbatasan dana operasional membuat ruang gerak BUMDes dalam menjalankan program terbatas. Bantuan dana dari pemerintah desa belum mencukupi untuk menjangkau semua kebutuhan pengembangan UMKM, seperti penyediaan modal usaha, pembinaan, atau fasilitas pemasaran. Kedua, sumber daya manusia yang terlibat belum memiliki kompetensi manajerial dan teknis yang memadai. Pengurus BUMDes belum dibekali pelatihan yang intensif, sehingga banyak keputusan strategis yang diambil

berdasarkan intuisi, bukan analisis. Selain itu, pelaku UMKM juga belum secara luas mendapatkan pelatihan kewirausahaan, keuangan, atau digital marketing. Ketiga, sarana dan prasarana penunjang, seperti tempat produksi bersama, ruang promosi, serta akses teknologi, masih terbatas. Kurangnya dukungan sumber daya ini berdampak pada lambatnya kemajuan UMKM binaan (Yudi, 2017). Oleh karena itu, penguatan kapasitas, pengalokasian anggaran yang memadai, serta sinergi dengan pihak eksternal (seperti perguruan tinggi atau LSM) sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BUMDes.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Dalam teori George C. Edward III, disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi individu yang bertugas melaksanakan kebijakan (Tahir, 2015). Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes di Desa Laut Dendang, indikator ini sangat penting karena pelaksana kebijakan adalah ujung tombak keberhasilan implementasi di lapangan. Pengurus BUMDes, aparat desa, dan tokoh masyarakat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

Sikap positif dan komitmen yang tinggi akan mendorong pelaksana untuk bekerja secara sungguh-sungguh, proaktif, dan berorientasi pada hasil (Susanti, 2022). Hal ini karena mereka tidak hanya melaksanakan instruksi secara formalitas, tetapi benar-benar berusaha memastikan bahwa UMKM lokal mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan BUMDes. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap pasif, tidak memiliki motivasi atau bahkan hanya menjadikan posisi mereka sebagai simbol tanpa tanggung jawab yang jelas, maka kebijakan akan sulit tercapai dan hanya menjadi dokumen administratif semata. Motivasi juga berpengaruh terhadap inisiatif pelaksana dalam menghadapi hambatan di lapangan. Pelaksana yang memiliki rasa kepemilikan terhadap program cenderung mencari solusi kreatif ketika menghadapi keterbatasan sumber daya atau tantangan teknis lainnya (Larasati, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya menunjuk pelaksana secara administratif, tetapi juga melakukan pembinaan dan penanaman nilai-nilai tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.

Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks BUMDes di Desa Laut

Dendang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaksana menunjukkan antusiasme dan tanggung jawab terhadap program pemberdayaan UMKM. Mereka berusaha menjalankan tugas dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Namun, ada pula pelaksana yang masih bersikap pasif dan kurang memahami pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya intensitas pelatihan dan kurangnya pembinaan dari pihak pemerintah desa membuat sebagian pengurus BUMDes belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang arah kebijakan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga menilai bahwa tidak semua pengurus BUMDes terbuka terhadap aspirasi mereka, sehingga muncul ketidakpercayaan. Komitmen pelaksana harus dibangun melalui pembinaan berkelanjutan, pemberian insentif, serta evaluasi kinerja yang objektif (Machali & Hamid, 2017). Jika para pelaksana memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan pemahaman mendalam terhadap tujuan kebijakan, maka mereka akan menjadi motor penggerak perubahan. Dalam jangka panjang, sikap positif dari pelaksana akan menciptakan budaya kerja yang produktif dan mendukung keberhasilan implementasi program pemberdayaan UMKM melalui BUMDes.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III karena menyangkut bagaimana organisasi pelaksana dibentuk, bekerja, dan berkoordinasi (Tahir, 2015). Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes di Desa Laut Dendang, struktur birokrasi yang jelas, efektif, dan responsif sangat menentukan keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang baik mencakup pembagian tugas yang jelas antara pengurus BUMDes, aparat pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait lainnya. Setiap aktor kebijakan harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kekosongan peran yang dapat menghambat kinerja organisasi. Selain itu, prosedur kerja yang sistematis mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, hingga evaluasi juga perlu disusun dan dijalankan dengan konsisten agar kegiatan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Pengawasan yang terstruktur juga menjadi komponen penting dalam struktur birokrasi (Labib, 2024). Pemerintah desa perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program BUMDes, memberikan evaluasi, serta menindaklanjuti temuan-temuan yang muncul. Dengan demikian, kebijakan dapat dikontrol dan diarahkan

secara berkelanjutan. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu kaku, lambat dalam merespon dinamika di lapangan, atau minim koordinasi internal dapat menghambat efektivitas implementasi. Prosedur yang berbelit, kurangnya fleksibilitas dalam mengambil keputusan, serta keterlambatan informasi dari atasan ke pelaksana teknis dapat menyebabkan stagnasi program (Fadhli, 2020). Oleh karena itu, diperlukan struktur birokrasi yang tidak hanya formal, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan dalam pemberdayaan UMKM melalui BUMDes.

Struktur birokrasi yang efisien dan responsif merupakan fondasi penting dalam mendukung kelancaran implementasi kebijakan (Mustari, 2015). Dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Laut Dendang, struktur organisasi telah dibentuk, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Pembagian tugas antar pengurus belum sepenuhnya jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi dengan baik, yang menyebabkan pelaksanaan program seringkali tidak sistematis. Ketidadaan mekanisme monitoring dan evaluasi rutin juga membuat pelaksanaan program kurang terarah dan sulit diukur keberhasilannya. Struktur birokrasi yang cenderung kaku, ditambah dengan rendahnya koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes, memperlambat proses pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki hal ini, perlu dilakukan penataan kelembagaan yang lebih profesional, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pengurus dalam hal administrasi dan tata kelola organisasi. Penguatan struktur birokrasi yang adaptif dan transparan akan mendorong BUMDes menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola program pemberdayaan UMKM secara efektif dan berkelanjutan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM melalui BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang

1. Keterlambatan Pengembalian Pinjaman

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang adalah keterlambatan pengembalian pinjaman oleh masyarakat. Meskipun program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses modal usaha, namun realisasinya menghadapi tantangan berupa rendahnya kedisiplinan sebagian penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban angsuran. Banyak peminjam tidak membayar cicilan tepat waktu, sehingga petugas BUMDes harus melakukan penagihan secara

berulang, yang menyita waktu dan tenaga. Dalam beberapa kasus, BUMDes bahkan terpaksa menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih pinjaman, yang menandakan adanya ketidakpatuhan serius dari pihak peminjam. Ketidaksiplinan ini menghambat perputaran dana BUMDes, mengurangi efektivitas program, dan menimbulkan risiko kerugian yang tinggi. Selain itu, keterlambatan pengembalian pinjaman juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang sedang membutuhkan modal. Masalah ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pengembalian serta lemahnya sistem seleksi dan monitoring penerima pinjaman (Tahir, 2015). Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif seperti edukasi keuangan, pendampingan intensif, serta penegakan aturan yang tegas agar program pinjaman BUMDes benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Kurangnya Seleksi Peminjam yang Ketat

Hambatan lain yang muncul dalam implementasi kebijakan BUMDes di Desa Laut Dendang adalah kurangnya mekanisme seleksi yang ketat terhadap calon peminjam. Meskipun pihak BUMDes mulai menyadari pentingnya selektivitas akibat meningkatnya jumlah keterlambatan pengembalian, hingga saat ini belum tersedia sistem seleksi dan evaluasi kelayakan usaha yang terstruktur dan objektif. Peminjaman masih dilakukan secara sederhana, tanpa melalui proses verifikasi menyeluruh terhadap latar belakang usaha, kemampuan finansial, dan riwayat pinjaman calon debitur. Akibatnya, banyak pinjaman disalurkan kepada pihak yang tidak benar-benar siap atau layak secara manajerial dan finansial, sehingga berisiko tinggi gagal bayar. Kurangnya prosedur seperti survei usaha, wawancara mendalam, atau analisis risiko dapat memperburuk keadaan (Hakim et al., 2017). Selain itu, belum adanya data administrasi yang kuat menyebabkan BUMDes kesulitan dalam memantau rekam jejak peminjam. Kelemahan ini tidak hanya mengganggu kelancaran program, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Untuk mengatasi hal ini, BUMDes perlu mengembangkan sistem seleksi berbasis data, pelatihan untuk tim verifikasi, serta merancang skema pemeringkatan risiko agar pinjaman lebih tepat sasaran. Langkah ini penting demi menjaga kesinambungan dana dan efektivitas program pemberdayaan UMKM.

3. Minimnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat

Hambatan penting dalam implementasi program BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan, mekanisme,

dan manfaat program yang dijalankan. Banyak warga desa, khususnya pelaku usaha kecil, belum sepenuhnya mengetahui bagaimana BUMDes dapat membantu mereka dalam hal akses permodalan, pelatihan usaha, maupun pengembangan kapasitas. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pengurus BUMDes masih bersifat terbatas, tidak merata ke seluruh dusun, serta belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Informasi lebih banyak disampaikan secara formal melalui kepala dusun tanpa dilanjutkan dengan diskusi interaktif atau pendampingan yang memadai. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program BUMDes masih rendah. Masyarakat yang belum paham cenderung pasif, bahkan ada yang ragu untuk mengakses layanan BUMDes karena khawatir terhadap risiko atau tidak yakin akan kebermanfaatannya. Kondisi ini memperlemah semangat gotong royong yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan BUMDes. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif, seperti penyuluhan langsung, pelibatan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media sosial atau forum warga (Rijal, 2023). Peningkatan literasi masyarakat akan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan implementasi program pemberdayaan yang diusung oleh BUMDes (Putri et al., 2023).

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Manajerial

Salah satu hambatan krusial dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek manajerial. Pengelola BUMDes sebagian besar berasal dari masyarakat desa yang belum memiliki latar belakang atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan lembaga ekonomi. Minimnya pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan kegiatan manajerial seperti pencatatan keuangan, perencanaan program, administrasi pinjaman, hingga pelaporan hasil usaha belum dilakukan secara profesional. Hal ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas, ketidaktepatan pengambilan keputusan, serta ketidakmampuan dalam mengelola risiko usaha secara efektif apalagi dalam suatu lembaga dan kegiatan (Jazuli et al., 2023). Ketiadaan sistem administrasi yang tertata juga menyulitkan evaluasi kinerja dan transparansi kepada masyarakat maupun pemerintah desa. Kondisi ini membuat BUMDes rentan terhadap mismanajemen yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajemen usaha desa, pendampingan dari tenaga ahli, serta penyusunan prosedur operasional yang baku. Selain itu, penting pula membangun sistem evaluasi berkala dan pembinaan dari pemerintah daerah agar

pengelolaan dapat berjalan profesional dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk BUMDes (Yasmansyah & Zakir, 2022).

Implikasi penelitian ini secara teoritis dapat memperkuat teori implementasi kebijakan publik dalam konteks lokal, khususnya di tingkat desa. Selain itu juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembangunan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pembangunan serta menambah literatur terkait hubungan antara desentralisasi fiskal (misalnya melalui Dana Desa) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan secara praktis memberikan gambaran nyata kepada pemerintah desa mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, serta area yang masih perlu perbaikan dan dapat digunakan oleh aparat desa untuk merumuskan program pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal serta menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten atau dinas terkait dalam melakukan supervisi, pelatihan, dan pendampingan terhadap kebijakan desa yang berfokus pada sektor UMKM. Dengan hal tersebut beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) Evaluasi dampak jangka panjang kebijakan desa terhadap UMKM. 2) Peran kelembagaan lokal dalam mendukung UMKM. 3) Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam UMKM desa.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah desa melalui BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang dalam mendukung pemberdayaan UMKM dapat ditinjau dari empat indikator utama menurut George C. Edward III. Pertama, aspek komunikasi menunjukkan bahwa sosialisasi program belum dilakukan secara maksimal dan merata. Penyampaian informasi cenderung satu arah, sehingga banyak pelaku UMKM belum memahami manfaat serta mekanisme program BUMDes secara utuh. Kedua, dari sisi sumber daya, pelaksanaan program masih terkendala keterbatasan dana, sarana, serta kualitas sumber daya manusia. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang bervariasi; sebagian pengurus aktif dan peduli, namun masih terdapat pelaksana yang kurang memiliki pemahaman dan tanggung jawab. Hal ini memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keempat, struktur birokrasi BUMDes belum tertata secara efisien. Mekanisme kerja belum berjalan sistematis dan koordinasi antar lembaga masih lemah, menghambat pencapaian tujuan program secara optimal.

Dengan demikian, agar pemberdayaan UMKM melalui BUMDes berjalan efektif dan berkelanjutan, perlu adanya peningkatan komunikasi yang partisipatif, penguatan kapasitas sumber daya, pembinaan terhadap pelaksana kebijakan, serta penataan struktur organisasi yang responsif dan transparan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi kebijakan ini.

Hambatan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui BUMDes Bumi Pertiwi di Desa Laut Dendang meliputi: Pertama, keterlambatan pengembalian pinjaman akibat rendahnya disiplin peminjam, bahkan hingga melibatkan *debt collector*. Kedua, sistem seleksi peminjam belum ketat, sehingga berisiko menyalurkan pinjaman kepada pihak yang tidak layak. Ketiga, sosialisasi program belum merata, mengakibatkan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Terakhir, pengelola BUMDes masih memiliki keterbatasan dalam manajemen dan administrasi karena minimnya pelatihan dan pendampingan, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan program secara profesional dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap beberapa hal meliputi: 1) Data empiris tentang peran pemerintahan desa. Penelitian ini menyajikan data lapangan mengenai bagaimana kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah desa secara nyata berdampak pada pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Ini mengisi kesenjangan data empiris yang selama ini lebih banyak terfokus pada kebijakan tingkat kabupaten atau nasional. 2) Analisis efektivitas kebijakan terhadap UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif (tergantung metodologi yang digunakan), penelitian ini dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh kebijakan desa terhadap peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian pelaku UMKM. Ini penting untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. 3) Pengayaan literatur pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan bukti nyata dari praktik di lapangan.

Dalam menyempurnakan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: 1) Evaluasi dampak jangka panjang kebijakan desa terhadap UMKM. Rekomendasi penelitian ke depan adalah melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan desa berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan UMKM dalam jangka waktu 5–10 tahun. 2) Peran kelembagaan lokal dalam mendukung UMKM. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam peran lembaga kemasyarakatan desa

(seperti BUMDes, kelompok tani, PKK, Karang Taruna) dalam mendukung dan menjalankan kebijakan pengembangan UMKM. 3) Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam UMKM desa. Riset lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan desa dapat mendukung digitalisasi UMKM, termasuk pelatihan digital marketing, penggunaan e-commerce, dan akses ke teknologi produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abrori, H. (2018). Inspiring Leadership Dan Transformasi Kelembagaan. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–22. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/245>
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., & Guampe, F. A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (1st ed.). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Ainiyah, N., Rubiyanto, R., & Aprilia, D. R. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pengelola Bumdes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa di Desa Pungging Mojokerto. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 251–259. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/index>.
- Amrullah, A., & Utami, E. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pada Smart UMKM dalam Mendukung Sleman Smart Regency. *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018*.
- Demarchi, C. (2020). A new decade for social changes. *Technium Social Sciences Journal*, 9(3), 228–297. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>
- Dohona, J. W. P., Gulo, N., & Sitepu, E. (2021). Peranan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Produktifstimulasi Ekonomi Di Kota Medan. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 150–156. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/1253>.
- DPR RI. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- DPR RI. (2014). *Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 291–298. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/176>.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 171–183. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Hakim, O. L., Ag, S., & Si, M. (2017). Pengaruh Kemampuan, Usaha dan dukungan otgaisasi terhadap kinerja pegawai. *Academia*, 2(2), 43–53. <https://ejournal.unida.gontor/artijaroh/view/5611>

- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.
- Indrawati, S. M. (2022). *Ini Upaya Pemerintah Jaga Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Perekonomian*. WwW.Kemenkeu.Go.Id.
- Iskandar, J., Engkus, E., Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <http://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/1>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Justine. (2016). *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* (Empat). Grasindo.
- Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v4i3.9676>
- Labib, F. (2024). Sustainability Strategy of The Farm Hydroponic Program In RPTRA (Child-Friendly Integrated Public Space) Strategi Keberlanjutan Program Hidroponik Farm Di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Pendahuluan. *Jurnal UINSU*, 12(2), 176–186. <https://jurnal.uinsu.ac.id/view/665>
- Larasati, P. M. (2021). Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja, dan disiplin kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, 10(5), 1. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4021/4033>
- Limanseto, H. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. WwW.Ekon.Go.Id.
- Limanseto, H. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022*. WwW.Ekon.Go.Id.
- Machali, I., & Hamid, H. N. (2017). *PENGANTAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mustari, M. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Najib, M. F., Februadi, A., Djarnika, T., Rafdinal, W., Lasambouw, C. M., & Nuryati, N. (2022). Inovasi Desain Kemasan (Packaging) sebagai Faktor Peningkatan Daya Saing Produk UMKM di Desa Ciwarua, Kabupaten Bandung Barat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 56–64. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8397>
- Pratiwi, E. T., Suriadi, S., & Jasiyah, R. (2021). Peningkatan Sumber Daya Manusia, Digital Marketing, dan Pengelolaan Kas Pelaku UMKM Saat Pandemi Covid-19. *The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 1(2), 30–34.
- Putri, D., Fauziah, S. N., & Gaol, P. L. (2023). Implementasi Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Mempersiapkan Era Society 5 . 0. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 5(2), 20–32. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/JSDA/article/view/648>
- Rijal, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Seukeum: Analisis Kinerja Pengelola di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(1), 28–40. <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jsen/article/view/866>

- Stefana, M., & Lubis, K. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Disnakertrans Sumut. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 45. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/5885>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Susanti, N. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Napolly Sentul Bogor*. Universitas Pakuan Bogor.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (2nd ed.). Alfabeta.
- Yasmansyah, Y., & Zakir, S. (2022). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Era Digital. *Indonesian Research Journal On Education*, 2(3), 1030–1037. <https://doi.org/10.31004/irje.v2i3.122>
- Yudi, A. A. (2017). PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DITINJAU DARI SEGI SARANA DAN PRASARANA (SARANA DAN PRASARANA PPLP). *Cerdas Sifa Pendidikan*, 2(1), 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/csp.v1i1.702>